

Operasi Perdamaian Masa Kini

Oleh: Willy F. Sumakul

1. Pendahuluan

Harus diakui bahwa di masa Perang Dingin peran utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban dunia tidak berjalan dengan baik. Di antaranya karena begitu kuatnya pengaruh dan tarik menarik kekuatan antara kedua Blok Barat dan Blok Timur. Selepas Perang Dingin, muncul keinginan dari sebagian besar negara anggota PBB untuk memanfaatkan peluang yang tersedia untuk lebih menegakkan Piagam PBB. Yaitu mempertahankan keamanan dan perdamaian internasional, menegakkan keadilan dan hak asasi manusia serta mempromosikan *social progress and better standards of life in larger freedom*.

Dan yang lebih penting lagi bahwa semua negara berkomitmen untuk menjadikan PBB suatu organisasi yang tidak timpang seperti pada masa lalu. Untuk mencapai semua itu, sejak tahun 1994 PBB melaksanakan beberapa konferensi tingkat dunia untuk berbagai isu penting seperti masalah lingkungan hidup dan pembangunan, HAM, kependudukan dan pembangunan, masalah perempuan, serta masalah pembangunan sosial secara umum.

2. Perubahan Lingkungan Keamanan

Transisi global saat ini ditandai dengan beberapa fenomena yang justru kontradiktif. Asosiasi negara-negara bersifat regional maupun kontinental bermunculan, didorong oleh keinginan untuk bekerja sama dalam segala bidang serta berupaya menghilangkan berbagai hambatan yang secara tradisional menyebabkan pertikaian, seperti kedaulatan dan rivalitas nasionalistik. Batas-batas teritorial menjadi kabur karena kemajuan komunikasi dan perdagangan global serta kesediaan negara-negara itu untuk lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar melalui asosiasi politik bersama.

Namun dalam waktu yang bersamaan, pemaksaan nasionalisme yang keras dan fanatisme etnis yang kuat, agama, sosial,

budaya, bahasa telah menjadi ancaman baru bagi keutuhan suatu negara. Keamanan dunia menghadapi tantangan baru yaitu berkembangnya kegiatan terorisme global yang memaksakan kehendak dengan ciri utama diskriminasi dan eksklusivisme. Ketika negara-negara yang memiliki kekuatan nuklir mulai berunding dan menyusun kesepakatan untuk mengurangi kekuatan senjata nuklirnya, di lain pihak penyebaran senjata pemusnah massal semakin meningkat dan senjata konvensional semakin ditumpuk di berbagai belahan dunia.

Ketika kekuatan rasisme mulai surut dan *apartheid* sudah menghilang, muncul ketegangan rasial baru yang diekspresikan dalam bentuk kekerasan. Penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa harapan untuk suatu kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia, revolusi dalam teknologi informasi telah menyatukan dunia ke dalam satu kesadaran, aspirasi dan solidaritas menentang ketidakadilan. Tetapi kemajuan tersebut juga membawa resiko keamanan baru, antara lain kerusakan ekologi, terganggunya kehidupan keluarga dan komunitas, pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, melebarnya jurang antara kaya dan miskin, kemiskinan, kelaparan, penyakit (wabah), pengungsi dan imigran gelap serta ketiadaan tempat tinggal.

Kekeringan dan penyakit tidak kalah hebat daya membunuhnya dari senjata-senjata di medan perang. Semua itu kini menjadi sumber dan konsekuensi dari konflik yang memerlukan perhatian dan prioritas utama PBB untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, upaya-upaya PBB dalam membangun stabilitas perdamaian dan keamanan harus mencakup semua masalah tersebut, jauh melampaui ancaman militer semata yang telah menjadi ciri dari kegiatan PBB di masa lalu.

Perluasan misi PBB menuntut perhatian dan upaya sungguh-sungguh dari setiap negara secara individu, regional, organisasi non pemerintah, maupun dalam sistem kerja dan tanggung jawab dari masing-masing bagian

dalam organisasi dunia tersebut. Seperti yang ditekankan oleh Sekretaris Jenderal PBB, *The foundation – stone of this work is and must remain the State. Respect for its fundamental sovereignty and integrity are crucial to any common international progress. The time of absolute and exclusive sovereignty, however, has passed its theory was never matched by reality. It is the task of leaders of states today to understand this and to find a balance between the needs of good internal governance and the requirements of an ever more independent world.*

3. Pengertian

Istilah *preventive diplomacy, peace making* dan *peace keeping* pada hakekatnya berkaitan satu sama lain dan diformulasikan sebagai berikut:

Preventive diplomacy adalah tindakan untuk mencegah munculnya/timbulnya perselisihan di antara pihak-pihak (negara, kelompok negara, kelompok non negara, fraksi dan sebagainya), mencegah perselisihan yang sudah ada bereskalasi menjadi konflik serta membatasi meluasnya konflik yang sudah terjadi.

Peacemaking adalah tindakan untuk membawa pihak-pihak yang bermusuhan/bertikai ke suatu persetujuan (*agreement*), utamanya melalui cara-cara damai seperti yang dimuat dalam Pasal VI piagam PBB.

Peacekeeping adalah pengerahan dari unsur-unsur PBB untuk hadir di lapangan/wilayah dengan persetujuan pihak-pihak yang terlibat, biasanya melibatkan pasukan militer PBB dan atau personil polisi atau seringkali juga personil sipil. *Peacekeeping* adalah suatu teknik/cara memperluas kemungkinan-kemungkinan bagi pencegahan konflik dan sekaligus mencapai perdamaian.

Peace building dapat dilakukan apabila *peacemaking* dan *peacekeeping* telah berhasil dilaksanakan, yaitu mencakup suatu upaya menyeluruh dalam hal mengkonsolidasikan

perdamaian yang sudah dicapai antara pihak-pihak yang berperang dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan rakyat. Upaya-upaya tersebut antara lain melucuti senjata, menegakkan ketertiban dan peraturan, kemungkinan pemusnahan senjata-senjata, pengembalian para pengungsi, pemberian dukungan latihan dan penasehat bagi personel keamanan, memonitor hasil pemilihan umum, melindungi hak asasi manusia mereformasi atau memperkuat institusi-institusi pemerintah dan lain sebagainya.

4. *Peacekeeping Operations* dan Tantangan Masa Kini

Di satu pihak tuntutan terhadap PBB untuk melaksanakan *peacekeeping operations* sampai dengan *peace building* semakin meningkat dewasa ini, tetapi di lain pihak tantangan dan masalah yang dihadapi juga semakin banyak dan kompleks sejalan dengan semakin luas peran yang dilakukan oleh PBB. Secara spesifik masalah-masalah tersebut meliputi logistik, peralatan dan perlengkapan, personel dan dukungan finansial.

Personil, setiap negara anggota PBB ingin berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Oleh karena itu jumlah personel yang dibutuhkan baik pengamat militer maupun pasukan tidak pernah kesulitan, tetapi tidak demikian halnya dengan dukungan logistik. Namun dalam kenyataannya, negara partisipan jarang sekali menyampaikan secara terbuka

dan jujur tentang persiapan dan kesiapan yang sudah dilakukan untuk melaksanakan tugas. Misalnya *Standby Arrangements* yang harus dikonformasikan melalui surat kepada Sekretariat Jenderal.

Hal itu penting karena menyangkut tingkat kemampuan dan jumlah personel terlatih yang telah disiapkan untuk tuntutan tugas yang meningkat. Lagi pula pemeliharaan perdamaian membutuhkan pejabat politik sipil, pemantau masalah hak asasi manusia, pejabat yang mengerti soal pemilihan umum, para ahli soal pengungsi dan bantuan kemanusiaan serta personel polisi. Semuanya mempunyai peran yang sama dengan personel militer. Seyogianya semua personel yang dilibatkan harus dibekali dengan berbagai kemampuan yang memadai.

Logistik dan peralatan, tidak semua negara partisipan mampu menyediakan pasukannya dengan peralatan yang dibutuhkan untuk tugas di luar negeri. Karena itu tidak jarang peralatan dan perlengkapan disediakan oleh negara partisipan lain atau oleh PBB sendiri, sekalipun PBB tidak punya cukup persediaan untuk itu.

Finansial, dana yang dikeluarkan oleh PBB untuk membiayai *peacekeeping operations*, sampai dengan tahun 1992, berjumlah US\$ 8,3 milyar dengan hutang yang belum dibayar sebesar US\$ 800 juta. Sedangkan dewasa ini dana yang dibutuhkan telah meningkat menjadi US\$ 3 milyar untuk jangka waktu 12 bulan saja. Dibandingkan dengan pengeluaran

biaya pertahanan dunia telah mencapai US\$ 1 triliun, tentu angka tersebut sungguh tidak sebanding. Oleh karena itu disarankan agar tiap-tiap negara anggota PBB menganggarkan biaya untuk operasi pemeliharaan perdamaian ke dalam anggaran pertahanan masing-masing.

5. Penutup

Tuntutan terhadap PBB untuk melaksanakan *peacekeeping operations* maupun *peace building* akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Sebagai konsekuensi dari tugas yang meningkat dan semakin luas, PBB ditantang untuk selalu meningkatkan kapasitasnya termasuk politiknya dan finansial. *Maritime peacekeeping operations* jelas merupakan bagian dari operasi ini dengan domain aktifitasnya adalah laut.

Keikutsertaan Indonesia dengan mengirimkan satu KRI ke perairan Lebanon, tentunya merupakan kehormatan dan prestise tersendiri bagi TNI Angkatan Laut. Karena itu harus dijawab dengan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya baik kapal, personel serta peralatan dan perlengkapannya agar dapat mengemban tugas dengan baik dan sukses. Uraian singkat ini sekedar memberikan gambaran bahwa tugas-tugas pasukan pemelihara perdamaian PBB telah berkembang demikian luas dan berbeda dengan tugasnya pada dua dekade lampau.

Referensi:

Ghali, Boutros-Boutros, *Agenda for Peace*, 1992

Tentang Penulis:

Budiman Djoko Said adalah Laksda TNI (Purn), alumni AAL-XV, mantan Komandan Seskoal (2000-2001). Kini menjabat Wakil Ketua FKPM dan Rektor UPN Veteran, Jakarta.

Willy F. Sumakul adalah Kolonel Laut (Purn), alumni AAL-XV, U.S. Naval War College (Naval Command College) 1993, U.K. Royal College of Defence Studies (Lemhannas Inggris) 1997, eks Direktur Pendidikan Seskoal (1998-2001). Saat ini menjabat Sekretaris merangkap analis di FKPM.

Alman Helvas Ali adalah analis di FKPM. Aktif menulis di beberapa majalah dan surat kabar dengan spesialisasi isu kekuatan laut dan keamanan maritim.